

TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI MINANGKABAU

Oleh: Abdul Fadhil
Dosen Jurusan MKU UNJ

Abstraksi

Dalam mempelajari sejarah perkembangan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, dikenal bahwa surau di daerah Sumatera Barat, Tengah dan Selatan merupakan suatu bentuk lembaga Islam pertama di Indonesia yang lahir dari budaya asli bangsa Indonesia sendiri. Dilihat dari sejarahnya, sebenarnya surau merupakan bangunan peninggalan kebudayaan masyarakat Minangkabau sebelum datangnya Islam. Setelah masuknya agama Islam, surau pun mengalami proses Islamisasi. Fungsinya yang semula sebagai tempat penginapan anak-anak bujang kini diperluas lagi menjadi tempat pengajaran dan pengembangan ajaran Islam, seperti menjadi tempat shalat (mushalla), tempat upacara--upacara keagamaan dan lain sebagainya. Dari surau inilah kemudian gerakan modernisasi Islam di Minangkabau tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya menjadi lembaga pendidikan Islam modern, bahkan menjadi prototype lembaga pendidikan Islam modern di Nusantara yang dijadikan referensi lembaga-lembaga pesantren modern di kemudian hari. Tulisan ini mencoba menelusuri sejarah proses transformasi surau dari lembaga tradisional menjadi lembaga pendidikan Islam modern.

Pendahuluan

Ketika mengkaji masalah dampak dunia Barat dan peradaban Islam, Warner Caskel merumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu peradaban siap menerima rangsangan-rangsangan kultural dari luar. Dua syarat tersebut, *pertama*, suatu kesadaran bahwa diri orang yang bersangkutan kurang; *kedua*, kontak antara kebudayaan yang bersangkutan harus terjadi pada lebih dari satu titik dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.¹ Dasar pemikiran ini penulis pinjam dan dijadikan kerangka dasar dalam mencermati perkembangan modernisasi (pembaharuan) Islam di Nusantara, khususnya di Minangkabau yang diperkirakan oleh para ahli sejarah

Islam sebagai akar dari pembaharuan tersebut.²

Dua persyaratan yang diminta Caskel tersebut telah terpenuhi dalam kasus tersebut di Minangkabau. *Pertama*, adanya kesadaran kurangnya

¹ Werner Caskel, "Dampak Dunia Barat dan Peradaban Islam", dalam Gustave E. Von Gruneboun (ed.), *Islam Kesatuan dan Keragaman*, alih bahasa Effendi N. Yahya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Lembaga Studi Islamika, 1983), h. 385

² Tesis tentang hal ini dapat dilihat misalnya Deliar Noer, *Gerakan Islam di Indonesia, 1900-1942*, (LP3ES, 1986); Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kasus Sumatra Thawalib*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), ataupun tulisan-tulisan lainnya.

tingkat intelektualitas keagamaan dalam masyarakat Minangkabau dalam upaya mengimplementasikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Hal tersebut dilihat dari segi kuantitas sedikitnya jumlah ulama di daerah ini disebabkan banyak yang terbunuh dalam menghadapi peperangan dengan kolonial Belanda, maupun dari segi kualitas dari “kelompok ulama” (disebut dengan *urang siak*) dalam memahami ajaran Islam secara mendalam. Kenyataan inilah yang menyebabkan banyaknya *urang siak* yang pergi ke tanah suci untuk menuntut ilmu, di samping tujuan utama untuk menjalankan ibadah haji. *Kedua*, sebagai dampak dari pertama, terciptanya kontak intelektual masyarakat Minangkabau yang belajar ke Saudi Arabia, khususnya di Mekkah dengan ulama Haramayn, sehingga menambah wawasan dan kesadaran baru bagi mereka untuk dikembangkan dan disebarluaskan kelak di kampung halaman mereka. Pada masa itu situasi dan kondisi masyarakat di Minangkabau yang jauh dari nilai-nilai Islam menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk mengubah ataupun meluruskan pemahaman dan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Proses modernisasi tersebut terus-menerus berlangsung tahap demi tahap dan menghasilkan perubahan-perubahan yang menyebabkan terintegrasikannya ajaran Islam dengan adat (tradisi) pada masyarakat Minangkabau sehingga melahirkan pepatah: Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah. Agama mengatakan, adat memakai (melaksanakannya).

Proses modernisasi pemikiran Islam di Minangkabau menurut Patricia Hamilton Brown, sebagaimana dikutip

Daya, tumbuh melalui lembaga pendidikan di daerah lingkungan surau.³ Gerakan pembaharuan tersebut lebih banyak berpusat pada lokasi--lokasi yang memiliki surau yang berkembang dengan baik dengan tenaga--tenaga agama dari pemuda-pemuda yang telah pergi ke Mekkah dan belajar agama di sana. Dari merekalah usaha pemurnian Islam dilakukan. Dikatakannya bahwa di Minangkabau bukan hanya pemurnian saja yang terjadi, melainkan juga modernisasi Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Van der Plas ketika membandingkan reformasi Islam yang dipelopori Muhammadiyah dengan reformasi Minangkabau.⁴ Menurutnya, bila dibandingkan reformasi yang terjadi di Jawa dilakukan agar umat Islam di pulau ini yang kebanyakan agak malas melaksanakan ajaran Islam supaya mereka lebih mendalami Islam, sedangkan di Minangkabau hal ini tidak perlu, karena masyarakat secara keseluruhan sudah sadar dan aktif beragama.⁵ Demikian pula halnya dengan Schrieke yang menyatakan bahwa reformasi di Minangkabau tersebut lebih merupakan revolusi intelektual atau revolusi golongan kedua.⁶ Sasaran yang hendak dicapai adalah pengembangan Islam yang murni, mengubah dan menyesuaikan hukum Islam dan mengobarkan

³ Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kasus Sumatera Thawalib*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 64

⁴ Istilah-istilah pembaharuan, modernisasi maupun reformasi pada tulisan ini menunjuk kepada pembaharuan dalam pengertian yang longgar, tanpa perbedaan arti dari masing-masing istilah tersebut dalam kerangka teori atau ajaran yang konkret (penulis).

⁵ *Ibid.*, h. 65

⁶ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: LP3ES, 1971), h. 45

semangat modern.⁷

Perkembangan selanjutnya terhadap pembaharuan di Minangkabau adalah pembaharuan pendidikan Islam, sebagai *elan vital* kesinambungan proses pembaharuan itu sendiri. Tulisan ini mencoba menelusuri kaitan surau terhadap proses pembaharuan pendidikan Islam yang terjadi di Minangkabau, faktor-faktor yang mendukung proses tersebut, kemunculan lembaga pendidikan Islam modern paska peleburan surau dan bagaimana pola hubungan lembaga surau dalam upaya memodernisasikan pendidikan Islam modern di daerah ini.

Pengertian Modernisasi Pendidikan Islam

Kebangkitan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah pembaharuan Islam di Nusantara. Steenbrink mencatat, sejak permulaan abad ke-20 terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang secara garis besar dapat disebut sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan (*renaissance*).⁸ Proses modernisasi ini merupakan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat yang kemudian masuk ke dalam dunia Islam pada awal abad ke--19. Sejak saat itulah mulai babak baru dalam sejarah Islam yang dipandang sebagai permulaan periode modern.⁹

⁷ Taufik Abdullah, *School and Politics, The Kaum Muda Movement in West Sumatera : 1927-1933*, (New York: Cornel University, 1971), h.45

⁸ Kareel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 26

⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.11

Pembaharuan itu sendiri menurut Harun Nasution, adalah "...pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern".¹⁰ Sebagaimana halnya di Barat dalam dunia Islam juga timbul pikiran dan gerakan paham-paham keagamaan dan institusi Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Upaya-upaya demikian bertujuan untuk melepaskan umat Islam dari kemunduran dan meraih kemajuan.¹¹

Pendidikan Islam, menurut Marimba, ialah terbentuknya kepribadian berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Definisi yang lain menyatakan bahwa pendidikan Islam usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik/murid agar kelak selesai pendidikan dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam serta menjadikannya sebagai jalan hidup.¹²

Oleh karena predikat dan orientasi yang berdasarkan keagamaan tersebut, tentu saja landasan moral dan tujuan dari pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan umum lainnya, seperti dikemukakan oleh Fadhil al-Jamali, sebagai berikut :

Pendidikan Islam berperan sebagai petunjuk dan penangkal. Melalui pendidikan Islam terbuka hidayah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*,h. 12

¹² Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Bandung: al-Ma'arif, 1962), cet. ke-4, h. 19

kepada iman, hidayah menggunakan akal, hidayah kepada akhlak yang mulia, dan suka beramal saleh.

Pendidikan juga berguna sebagai penangkal terhadap syirik, kebathilan, kesesatan, kerusakan jasmani dari segala apa yang membahayakan kesehatan, kerusakan hubungan sosial, kerusakan hubungan moral dan dari bahaya-bahaya lainnya.¹³

Dari dua batasan tentang pembaharuan dan pendidikan Islam tersebut, dapat dirumuskan pengertian modernisasi pendidikan Islam, yaitu usaha untuk membimbing dan mentransfer nilai-nilai Islam, secara jasmani dan rohani membentuk terjadinya kepribadian yang utama dengan cara pendekatan yang terbaru yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa itu.

Realisasi dari proses modernisasi, secara institusional, dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam terjadinya perubahan pada lembaga pendidikan Islam tradisional (seperti surau, pesantren, meunasah, dsb.) kepada lembaga modern, seperti sekolah agama, Islamic college, dan belakangan semua menjadi madrasah. Perubahan tersebut juga diikuti oleh perubahan metode dan teknik pengajaran yang terbaru. Paling tidak, tampaknya ada enam indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat perbedaan sistem pendidikan tradisional dengan yang modern. Indikator-indikator tersebut adalah: *pertama*, materi pelajaran yang diberikan oleh sistem pendidikan tradisional hanya sebatas kepada materi pelajaran agama, utamanya Alquran dan

pelajaran yang terkait dengan ibadah dan bahasa Arab, sedangkan sistem pendidikan modern di samping memberikan materi pelajaran agama juga pelajaran umum, misalnya bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Belanda, ilmu bumi dan ilmu hitung. *Kedua*, proses pengajaran sebelumnya dilakukan secara halaqah, murid duduk di lantai, tanpa bangku, dan tidak menggunakan papan tulis, sedangkan di madrasah menggunakan sistem klasikal, menggunakan bangku dan papan tulis. *Ketiga*, pada sistem tradisional setiap murid bebas menentukan materi yang disenangi, tidak membedakan umur dan kualitas para pesertanya, sedangkan pada sistem modern disesuaikan dengan sistem klasikal yang diatur sesuai dengan kualitas murid dan memakai rencana pelajaran (kurikulum). *Keempat*, sistem tradisional bersifat hafalan, sedangkan sistem modern lebih mengarah kepada pemahaman. *Kelima*, tenaga pengajar pada sistem lama hampir mengajar pada semua materi pelajaran, sedangkan pada sistem baru tenaga pengajar disesuaikan dengan keahliannya. Dan *keenam*, sistem yang lama tidak mengenal evaluasi secara formal, sedangkan sistem modern menggunakan evaluasi secara formal, dan mendapat ijazah setelah lulus.¹⁴ Gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang intens tersebut digerakkan oleh para tokoh pembaharu, baik secara pribadi maupun organisasi, yang berusaha secara sadar agar pendidikan Islam tetap memainkan elan vital untuk mengantisipasi perubahan zaman dengan peran strategisnya dalam menghadapi arus kehidupan yang kompleks.

¹³ Fadhil al-Jamali, *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, alih bahasa Muzayyin Arifin, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1988), h. 47

¹⁴ Abdurrahman Saleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Dharma Sakti, 1984), h. 14

Kemunculan Lembaga Pendidikan “Modern”

Penjajahan yang membawa kerugian yang besar bagi seluruh bangsa Indonesia di pelosok nusantara juga mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan mereka. Pihak penjajah tidak menghiraukan sedikitpun masalah pendidikan rakyat Indonesia, bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti surau, pesantren, langgar dan rangkang tidak dianggap perlu oleh penjajah dan setiap gerak dan langkahnya dihalang-halangi dan dicurigai. Lembaga-lembaga tersebut menurut penjajah, hanya merupakan alat meninggikan akhlak saja dan menjadi sumber semangat perjuangan rakyat. Oleh karena itu, pihak penjajah melakukan peraturan umum tentang persekolahan, yang pada dasarnya adalah larangan memberi pelajaran tanpa seizin Gubernur Jenderal.

Kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda pada awal abad ke-20 membuat Pemerintah Belanda harus mengadakan perubahan dari politik eksploitasi kepada politik etis (*Etische Politiek*). Realisasi dari politik etis yang dimulai sejak tahun 1901 itu, mengharuskan Pemerintah Kolonial Belanda menyelenggarakan berbagai jenis sekolah menurut kebutuhan, yaitu sekolah untuk keturunan Belanda, sekolah untuk bangsawan bumi putera, dan juga untuk rakyat biasa.¹⁵ Kebijakan baru tersebut, mengharuskan Belanda mendirikan sekolah-sekolah lebih banyak lagi, terutama untuk pribumi. Maka berdirilah sekolah-sekolah rakyat (*Volks School*) hampir di seluruh Nusantara, termasuk di nagari-nagari Minangkabau. Di Minangkabau sendiri

pada tahun 1915 jumlah sekolah tersebut mencapai 111 buah dan pada tahun 1915 berjumlah 358 buah.¹⁶

Politik etis yang berintikan peningkatan pendidikan dan emansipasi bangsa Indonesia secara berangsur diusahakan untuk mencapai kesejahteraan melalui irigasi, transmigrasi, reformasi, pendewasaan, perwakilan, dan ditumpukan kepada pendidikan,¹⁷ ternyata tidak memperhatikan agama sama sekali. Sekolah yang berlabelkan agama dibiarkan hidup sendiri, tanpa pengakuan kecuali dicurigai dan dikekang. Banyak surau maupun pesantren di Pulau Jawa dibiarkan hidup tanpa bantuan.

Ketidakpedulian Pemerintah Belanda terhadap pendidikan agama menjadikan umat, terutama para ulama, anti terhadap pendidikan pemerintah dan berusaha mempertahankan lembaga pendidikan Islam. Pendidikan yang diciptakan pemerintah untuk anak pribumi hanyalah untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat dibayar murah. Keadaan seperti ini mengakibatkan adanya jurang pemisah yang semakin dalam antara penjajah dan bangsa Indonesia, karena pemerintah hanya menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kepada intelektual, sedangkan umat Islam kebanyakan menyelenggarakan pendidikan yang berorientasikan kepada keakhiratan.¹⁸

Perkembangan ini menjadi tantangan yang besar bagi para pembaharu, terutama yang baru datang

¹⁵ Abdurrahman Saleh, *log.cit.*

¹⁶ Azyumardi Azra, “Surau di Tengah Krisis: Pesantren Dalam Perspektif Masyarakat Minangkabau”, dalam M. Dawam Raharjo, (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dart Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), h. 165-166

¹⁷ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 18

dari Mekkah yang kebanyakan adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Mereka melihat semakin menguatnya dominasi pemerintah kolonial dalam kehidupan sosial politik masyarakat di daerah ini terutama di bidang sekuler dan diperkirakan dapat mengancam eksistensi surau sebagai satu-satunya lembaga pendidikan keagamaan di Minangkabau yang mapan pada waktu itu. Oleh karena itulah, diusahakan berbagai cara untuk mencari solusi dalam menjawab tantangan pemerintah kolonial.

Pada tahun 1907 Haji Abdullah Ahmad, salah seorang murid Syekh Ahmad Khatib, mendirikan sekolah agama pertama untuk Indonesia di Padang Panjang, yaitu Adabiah School.¹⁹ Daya mencatat penamaan ini mungkin sekali dimaksudkan sebagai simbol kebangkitan ilmu pengetahuan, menunjang peradaban Islam lewat jenjang pendidikan yang diilhami oleh hadits: *Addabani rabbi fa-ahsana ta'dibi*.²⁰ Berbeda dengan pendidikan surau, Adabiah School menerapkan sistem klasikal yang dilaksanakan secara konsekuen. Sekolah ini diatur berkelas, sistem belajar dan mengajar dilaksanakan dengan memakai bangku, meja, papan tulis, dan buku-buku. Materi pelajaran agama Islam seperti yang terdapat di surau-suru ditambah pengetahuan umum seperti membaca huruf Latin serta berhitung.²¹ Namun demikian, sekolah ini tidak berumur panjang dan belum sampai usia setahun sudah dipindahkan ke Padang.²²

¹⁸ Abdurrahman Saleh, *log.cit*

¹⁹ Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 38

²⁰ Burhanuddin Daya, *op.cit.*, h. 82

Kegagalan sekolah ini tidak lebih karena mendapat reaksi dan tantangan yang keras dari masyarakat, sehingga Abdullah Ahmad kesulitan untuk mengembangkannya.²³ Perkembangan lebih lanjut, Adabiah di Padang yang baru didirikan dapat berkembang, karena masyarakat Padang lebih dinamis dan berpikiran luas.

Pada tahun 1910 Syekh Muhammad Thaib Umar mendirikan Madras School di Sungayang yang memberikan pengajian tentang kitab-kitab besar menurut sistem halaqah, tetapi pada tahun 1913 sekolah ini terpaksa ditutup karena kekurangan tenaga guru.²⁴ Tahun 1918 sekolah tersebut dihidupkan kembali oleh Mahmud Yunus.²⁵

Pada tahun 1915, Zainuddin Labai mendirikan Diniyah School di Padang Panjang, sebuah sekolah agama plus pendidikan umum, kebalikan dari Adabiah School Padang. Sekolah ini masih bertempat di surau atau masjid tetapi diselenggarakan dengan sistem dan metode pendidikan umum, berkelas, berbangku, berpapan tulis dan memakai buku pelajaran. Sekolah ini dibagi kepada dua tingkat; tingkat dasar (ibtidaiyah) dan menengah (tsanawiyah), lama belajar masing-masing tiga dan empat tahun.²⁶

Adabiah School Padang dan Diniyah School Padang Panjang dapat dianggap sebagai pelopor pendidikan nasional di

²¹ Karel A Steenbrink, *loc.cit.*

²² *Ibid.*

²³ Burhanuddin Daya, *op. cit.*, h.84

²⁴ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), cet. ke-4, h. 63

²⁵ *Ibid.*, h. 66

²⁶ *Ibid.*, h. 68

bidang sekolah agama, karena memadukan pendidikan umum dan agama. Menurut Daya, kedua sekolah tersebut merupakan satu pola kombinasi pendidikan yang harmonis.²⁷

Tidak kalah menariknya dengan dua sekolah tersebut di atas adalah perguruan Thawalib Padang Panjang yang merupakan lembaga pendidikan yang terpenting dan berpengaruh di Minangkabau, maupun di Nusantara. Dikatakan penting karena dari lembaga inilah lahir para pelopor gerakan pembaharu di Minangkabau yang dikenal dengan Gerakan Kaum Muda. Sekolah yang lahir dari sebuah surau yang dikenal dengan sebutan *Surau Jembatan Besi* ini, berdiri di bawah pimpinan Syekh Abdul Karim Abdullah (ayah Hamka) dan merupakan cikal bakal lahirnya Sumatera Thawalib, baik di Padang Panjang maupun di daerah sekitar Minangkabau. Lembaga pendidikan surau ini berdiri pada tahun 1904. Sejak itu pulalah para pedagang yang datang ke kota ini mengaji dan dari surau ini timbul gerakan pendorong kemajuan pendidikan, publikasi, tabligh akbar dan perdebatan--perdebatan umum dengan para ulama Islam tradisional dan golongan adat.²⁸ Surau Jembatan Besi yang pada mulanya hanya merupakan tempat pengajian umum, akhirnya menjadi sebuah organisasi yang luas ruang lingkupnya dan aktivitasnya dengan nama Sumatera Thawalib pada tahun 1914. Pada waktu bersamaan, anak-anak mengaji Surau Parabek membentuk suatu organisasi pelajar dan pada tanggal 15 Februari 1919, murid-murid Surau Jembatan Besi dan murid-murid Surau Parabek membentuk federasi yang diberi nama

²⁷ Burhanuddin Daya, *loc.cit.*

²⁸ Taufik Abdullah, *loc.cit.*

Sumatera Thawalib atau Organisasi Murid-murid Sumatera.²⁹

Pemberian pelajaran berkelas di perguruan Sumatera Thawalib Padang Panjang baru sempurna dilaksanakan pada tahun 1921. Mulai saat itulah Haji Rasul menekuni berbagai kitab yang selama ini dipakai dengan kitab-kitab baru, seperti kitab Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, kitab tafsir Muhammad Abduh, *Al-Manar*, maupun kitab-kitab lainnya.³⁰ Menurut Daya, mulai saat inilah Thawalib dianggap sudah menampilkan dirinya menjadi sekolah agama Islam modern.³¹

Keberhasilan Sumatera Thawalib Padang Panjang tersebut mempengaruhi dan mendorong surau-suru lain yang dipimpin oleh para murid Syekh Ahmad Khatib untuk mengubah suraunya menjadi sekolah, seperti yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Musa dengan mendirikan Sumatera Thawalib Parabek pada tanggal 21 September 1921, Syekh Abbas Abdullah mendirikan Sumatera Thawalib Padang Panjang pada tahun 1919, Muhammad Thaib Umar mendirikan Sumatera Thawalib Sungayang Batusangkar tahun 1921, begitu pula di daerah-daerah lain seperti Payakumbuh, Maninjau, Pariaman, Kubang Putih,³² sehingga pada tahun 1933 jumlah Thawalib di Minangkabau sebanyak 44 buah.³³

Demikian gambaran ringkas kemunculan lembaga pendidikan Islam "modern" dengan seluk beluknya. Satu hal yang dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan sementara bahwa

²⁹ *Ibid.*, h. 35

³⁰ Mahmud Yunus, *op.cit.*, h. 153

³¹ Burhanuddin Daya, *op.cit.*, h. 144

³² *Ibid.*, h. 105-143

³³ Azyumardi Azra, *op.cit.*, h. 170

kemunculan sekolah-sekolah agama tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran surau yang telah menyumbangkan bagi kelahiran sekolah-sekolah agama, baik secara langsung dengan merubah surau tersebut menjadi sekolah agama (madrasah) maupun melalui para lulusannya yang telah mewarnai perkembangan Islam di Minangkabau.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Mendukung Modernisasi Surau Menjadi Lembaga Islam “Modern”

Di atas telah dijelaskan tentang kemunculan sekolah-sekolah agama modern yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kaitan dengan surau. Namun disadari pula bahwa kemunculan sekolah-sekolah tersebut tidak dapat pula dipisahkan dari rangkaian perjalanan panjang pembaharuan (terlepas dari istilah-istilah yang digunakan para pakar, seperti: modernisasi, reformasi, purifikasi, westernisasi, revolusi, dsb., pen.) Islam di Nusantara, khususnya di Minangkabau. Dengan demikian terbentuklah simpul-simpul yang saling mengikat dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya modernisasi surau menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern terutama dalam kurun waktu penghujung abad ke-19 sampai dua dasawarsa awal abad ke-20. Penulis mencoba merangkum pendapat para ahli, baik yang berhubungan dengan proses pembaharuan Islam secara umum maupun berhubungan langsung dengan eksistensi surau. Tentu saja dalam hal ini, seperti penulis nyatakan dalam bab Pendahuluan, bahwa tesis upaya memodernisasi lembaga tradisional surau ini merupakan suatu

terobosan dalam menjawab “krisis surau” ataupun “robohnya surau” yang mengandung makna positif.

Dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi upaya memodernisasi lembaga pendidikan Islam studi kasus surau ini, penulis membagi kepada dua kelompok secara garis besar, yakni faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal.

Yang penulis maksud dengan faktor internal adalah situasi dan kondisi di Minangkabau pada saat itu, serta pengaruh yang berasal dari sumber ajaran Islam yang dijadikan landasan ideal dalam mekanisme penyelenggaraan pendidikan Islam. Sedangkan faktor eksternal adalah dampak dari situasi dan kondisi “di luar” surau maupun masyarakat Minangkabau, sehingga mengakibatkan “lemahnya” sistem pendidikan surau dalam hubungannya menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kemerosotan lembaga surau sejak pasca perang Padri hingga menjelang abad ke-20 yang ditandai dengan beberapa fenomena, seperti :
 - a. Tekanan kolonial Belanda terhadap lembaga surau yang sebelumnya merupakan basis gerakan Padri, seperti larangan berkumpul, melakukan kegiatan keagamaan dan sebagainya.
 - b. Banyaknya ulama yang tewas dalam perang Padri, sehingga banyak pula surau yang terlantar karena ketiadaan syekh ataupun guru tuanya.
 - c. Semakin kuatnya dominasi kelompok adat, sebagai lawan kaum Padri, yang mendapat dukungan dan menjadi kaki tangan pemerintah kolonial

- Belanda.
- d. Terjadinya pergeseran sistem kekeluargaan secara evolutif, dari konsep *multi generational family* yang lebih bersifat sosial kepada konsep keluarga batih (*nuclear family*) yang cenderung individualistik.³⁴
 2. Semakin banyak kaum muslimin yang melakukan perjalanan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan menuntut ilmu di sana. Setelah mereka kembali, mereka berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan sebagaimana telah mereka pelajari dari tanah suci.
 3. Lahirnya semangat nasionalisme dan patriotisme dari umat Islam sebagai akibat kolonisasi Belanda, khususnya dalam bidang pendidikan.
 4. Rasa tidak puas dengan institusi (tradisional) selama ini dalam mempelajari agama, sehingga melahirkan berbagai usaha untuk memperbaiki lembaga umat Islam, baik dari segi metode maupun isinya, dan mengusahakan kemungkinan memasukkan pendidikan umum ke dalam lembaga yang baru.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya meliputi :

1. Pemikiran modern dalam Islam yang dipelopori Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui "mahasiswa" muslim yang belajar di tanah suci.
2. Anggapan perlunya organisasi untuk mempercepat tercapainya tujuan dan sebagai upaya untuk mengkonsolidasi kekuatan.
3. Pengaruh sistem pendidikan Barat yang terkoordinasi dan sistematis,

apalagi sejak terbukanya politik etis yang terealisasi lewat pembangunan sekolah-sekolah umum sekuler yang berorientasi kerja. Tentu saja hal ini banyak menarik perhatian masyarakat, sehingga sekolah agama dinomorduakan atau tidak lagi menjadi suatu yang dipentingkan.³⁵

Pola Hubungan Antara Lembaga Pendidikan Surau dengan Upaya Memodernisasi Pendidikan Islam di Minangkabau

Dalam suatu seminar tentang reorientasi wawasan pendidikan antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, Tholhah Hasan, mengemukakan bahwa setidaknya ada kemungkinan yang terjadi dalam perspektif historis pergulatan dan persentuhan antara pendidikan Islam dengan realitas sosio-kultural sebagai usaha manusia Indonesia dalam rangka mengembangkan potensi dan kepribadiannya. Kemungkinan tersebut, yaitu: *pertama*, pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosial-kultural dalam pengertian memberikan wawasan filosofis, arah pandangan, motivasi perilaku dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru; *kedua*, pendidikan Islam dipengaruhi oleh realitas perubahan sosial dan lingkungan sosial-kultural dalam penentuan sistem pendidikan, institusi dan pilihan-pilihan prioritas juga eksistensi dan aktualisasi dirinya.³⁶

Kedua bentuk kemungkinan di atas telah berjalan dalam gerakan pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya. Demikian pula halnya

³⁵ Zuhairini (*et.al.*), *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), cet. ke-4, h. 157

³⁴ *Ibid.*, h. 163-165

dengan surau, akibat pengaruh internal dan eksternal seperti yang telah disebutkan di atas menjadikan orang siak, para murid surau, bangkit dan berjuang untuk mempertahankan eksistensi surau dan telah berhasil mewarnai corak kebudayaan lokal dengan pola keagamaan Islam yang sesuai dengan syari'at. Pergulatan sosio-kultural dengan nilai-nilai keagamaan mencapai puncaknya dengan terbentuknya simbol yang bercorak simbiosis mutualisma dalam bentuk pepatah, salah satunya yang berbunyi: *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, Agama mengatakan, adat memakai*. Simbol keagamaan ini pula yang menjadi ruh perjuangan dalam menghadapi kolonial Belanda, sehingga menggetarkan Belanda di sana.³⁷ Disamping itu, pengaruh sosio-kultural itu pula yang menyebabkan surau harus lebih banyak “belajar” meniru ataupun mengubah institusi yang telah ada dengan suatu institusi (dalam hal ini: sekolah agama) modern guna menghadapi tantangan dari perkembangan zaman. Agaknya, kasus seperti surau ini dapat dikatakan merupakan contoh yang mewakili analisis Arkoun tentang teori dekonstruksi dan rekonstruksinya pada tingkat kelembangan (institusional).³⁸

³⁶ Mohammad Tholhah Hasan, “Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Reorientasi Wawasan Pendidikan”, dalam Yuhana Ilyas (*et.al.*), *Muhammadiyah dan NU, Reorientasi Wawasan Keislaman*, (Yogyakarta: LPPI UMY, LKPSM NU dan PP al-Muhsin Yogyakarta, 1993), h. 49

³⁷ Pistorius menuliskan ketakutan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Minangkabau dengan ungkapan, “Kita duduk di atas Vulkano pengikut Muhammad”, (Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat, op. cit.*, h. 216)

Tidaklah berlebihan kalau kita melihat lebih jauh perjalanan sejarah surau itu sampai dengan terbentuknya sekolah-sekolah agama yang kemudian banyak menggunakan konsep school, bila dilihat kasus Sumatera Thawalib pasca peleburan surau. Surau yang pada awalnya merupakan warisan dari peninggalan budaya Hindu, sejak kedatangan Islam telah diislamkan tanpa mengubah fungsinya dan disesuaikan dengan muatan Islam. Pada suatu ketika surau pun mengalami perubahan seperti pada Sumatera Thawalib hampir di seluruh pelosok Minangkabau dan beberapa daerah di luar Minangkabau seperti Aceh, Tapak Tuan, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu dan Lampung, bahkan sampai ke Sulawesi dan Kalimantan.³⁹ Hal ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai konflik dan dinamika dengan pasang surutnya yang silih berganti, sejak pasca Perang Paderi sampai kepada “perseteruan” antara Kaum Muda dengan Kaum Tua di daerah ini.

Proses “dekonstruksi dan rekonstruksi” surau ini juga, menurut Nurcholis Madjid, menunjukkan masyarakat Minang mengalami universalisasi. Artinya, budaya masyarakatnya menjadi sama dengan

³⁸ Menurut Arkoun, semua simbol dan mitos keagamaan harus dibuka kembali dan kembali ditelaah sesuai dengan perubahan cara memandang yang sedang berlangsung (h. 194-195). Lebih lanjut, menurut Arkoun, dekonstruksi mesti disertai “rekonstruksi” (pembangunan kembali) suatu wacana atau kesadaran yang meninggalkan keterbatasan, pembekuan dan penyelewengan wacana sebelumnya (h. 25), Uraian lebih mendalam lihat Mohammed Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: INIS, 1994)

³⁹ Burhanuddin Daya, *op.cit.*, h. 146

masyarakat lainnya dalam beberapa hal.⁴⁰ Menurutnyapun, "...semua proses itu jelas akibat dari proses modernisasi masyarakat Minang. Orang Minang adalah orang yang memakai ide modernisme. Yang terlihat pada kepeloporan mereka terhadap sistem pendidikan modern, termasuk Mahmud Yunus yang mendirikan KMI dan kemudian diterapkan di Gontor sehingga sekarang beranak pinak".⁴¹ Disadari atau tidak, menurut penulis, hampir keseluruhan sekolah agama di Minangkabau memakai istilah Barat, seperti *school*, *training* atau *college*, bukan madrasah seperti pada saat sekarang ini. Hal ini menunjukkan juga betapa akomodatif dan liberalnya masyarakat Minang dalam menerima gagasan-gagasan dari luar, sekalipun dari Barat yang semula hal itu diharamkan.⁴²

Tetapi menurut Taufik Abdullah, modernisasi pendidikan agama itu tampak mengandung kecenderungan sekularisasi dalam sistem pendidikan Islam di Minangkabau,⁴³ seperti terlihat misalnya pada komposisi kurikulum materi pelajaran umum yang kian membengkak. Adapula sebagian besar kemudian berubah menjadi sekolah umum - tentunya dengan kurikulum pelajaran umum yang paling dominan -

dan sebagian lagi berusaha mempertahankan identitasnya sebagai sekolah Islam dengan menempatkan banyak mata pelajaran keislaman di dalam kurikulumnya.⁴⁴

Urang Siak dari kalangan Kaum Muda setelah mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan agama yang berlabelkan "school-school" itu berhasil tampil di tengah-tengah masyarakat sebagai guru agama, propagandis, pimpinan masyarakat dan ulama modern. Semua sekolah agama yang bertebaran di seluruh Sumatera, dibangun dan digerakkan oleh tamatan Sumatera Thawalib. Dengan demikian, kemajuan Sumatera Thawalib berarti kemajuan Indonesia pada umumnya.⁴⁵ Melihat kenyataan ini Sumatera Thawalib berhasil memperbaharui sistem dan metode pendidikan tradisional surau.⁴⁶

Bila ditinjau lebih dalam keberhasilan Sumatera Thawalib memodernisasikan lembaga pendidikan tradisional surau itu sendiri tidak terlepas dari semangat urang siak itu yang telah menjadi cerdas pandai muslim yang cerdas hasil didikan surau. Mereka berperan dalam segala aktivitas masyarakat untuk berkiprah menuju kepada perbaikan dan pembaharuan. Dan tidak lupa pula mereka sumbangkan gagasannya untuk mencerdaskan umat agar terlepas dari keterbelakangan dan kejumudan yang selama ini membelenggu mereka. Salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam yang berwawasan modern dan ke masa depan. Mereka terus menerus berusaha memajukan,

⁴⁰ Dialog Jum'at, *Republika*, (Jakarta), 8 November 1996, h.8

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Agaknya fleksibilitas adat yang *tak lakang dek panas, tak lapuk dek hujan* turut pula mendukung gagasan ini, Malah secara khusus Elizabeth Graves menulis disertasinya tentang manfaat yang diperoleh orang Minang untuk kepentingannya dalam rnespon kolonialisme Belanda. Lihat Elizabeth E. Graves, *The Minangkabau Response to the Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*, (New York: Cornell University, 1981)

⁴³ Taufik Abdullah, *Schools*, *op.cit.*, h. 212

⁴⁴ Azyumardi Azra, *op.cit.*, h. 212

⁴⁵ Burhanuddin Daya, *op.cit.*, h. 149

⁴⁶ Azyumardi Azra, *loc.cit.*

menyempurnakan dan memodernisasi sistem pendidikan Islam dan dalam waktu yang sama mereka juga menjembatani jurang pemisah antara ulama--ulama muda yang mereka hasilkan ratusan tiap tahunnya dengan kaum cerdik pandai berpendidikan Barat.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan Sumatera Thawalib sebagai pelopor modernisasi surau, Ma'rifat Maradjani seorang ulama dari Riau, dalam suatu wawancaranya dengan Burhanuddin Daya, menilai ada sepuluh kriteria keberhasilan Sumatera Thawalib sebagai sebuah organisasi ataupun sebuah perguruan. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai pelopor yang merubah sistem pengajian surau menjadi sekolah agama. *Kedua*, berhasil memasukkan mata pelajaran umum ke dalam sekolah agama. *Ketiga*, murid-murid dan lulusannya semua berjiwa revolusioner, mempunyai kebebasan berpikir, bebas berjalan sendiri asal tidak menyimpang dari Alquran dan Sunnah. *Keempat*, dalam kelas dan ruangan-ruangan muzakarah, munazarah, mereka selalu mendiskusikan kenapa kaum muslimin mundur, sedang umat beragama lain maju. *Kelima*, mereka berani mengorek-ngorek Alquran dan Sunnahnya. *Keenam*, mereka tidak terikat kepada mazhab fikih. Mereka membaca mazhab yang empat, akan tetapi mengamalkan apa yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah. *Ketujuh*, membuka mata umat Islam Sumatra terhadap buku-buku atau kitab-kitab hasil karya ulama-ulama Islam modern. *Kedelapan*, menanamkan

kesadaran berbangsa dan berpolitik kepada masyarakat. *Kesembilan*, menggerakkan kemajuan dan perubahan dengan mendirikan berbagai organisasi, penerbitan, kesenian dan gerakan pemuda serta kesejahteraan umat. Dan *kesepuluh*, mereka berpikiran maju. Maka siapa yang berpikiran maju, masuklah ia ke Thawalib. Ciri pikiran maju adalah: ingin bersekolah, ingin banyak belajar, ingin anak--anaknya belajar, ingin bermasjid indah, tidak mau dijajah terus, berani mengoreksi, dan mau dikoreksi.⁴⁸

Kesepuluh kriteria yang telah disebutkan di atas, agaknya juga merupakan "keberhasilan" dari suatu upaya modernisasi surau melalui orang-orang yang telah mengecap dan mendapatkan didikan lembaga tradisional surau.

Walaupun pada akhirnya surau banyak yang merubahnya menjadi sekolah agama modern ataupun berafiliasi dengan sekolah agama yang sudah ada, namun demikian surau tidaklah lenyap begitu saja. Memang pada kenyataannya, peran sentral yang dimainkan surau sebagai pusat transformasi sosio-kultural tereduksi (menciut) setelah kelahiran sekolah-sekolah modern. Namun secara fungsional, surau masih menjadi tempat shalat sebagaimana halnya dengan mushalla. Dan krisis ini tidaklah berarti proses transformasi sosio-kultural terhenti sampai di situ, justru proses tersebut merupakan langkah awal dari proses universalisasi budaya lokal Minangkabau menuju masyarakat modern.

⁴⁷ Burhanuddin Daya, loc. cit.

⁴⁸ *Ibid.*

Penutup

Surau di Minangkabau berperan penting dalam kehidupan masyarakat di daerah ini, tidak saja karena merupakan tempat mengajarkan ajaran agama, tetapi lebih dari itu juga berfungsi menjadi pusat transformasi nilai-nilai budaya Minangkabau sebagai akibat langsung dari sistem matrilineal yang dianutnya. Sebagai lembaga pendidikan tradisional keagamaan, surau memiliki karakteristik tersendiri dengan kompleksitas peran dan pengaruhnya terhadap masyarakat Minangkabau. Hirarki kepemimpinan—seperti syekh, guru tuo, guru bantu dan murid—menjadikan surau sebagai suatu komunitas yang dipentingkan bagi masyarakat di sekelilingnya. Masyarakat membutuhkan “urang siak” untuk menerima ajaran-ajaran syari’at (Islam), sedang urang siak membutuhkan mereka berupa sumbangan yang diberikan untuk surau.

Pengaruh Barat (dalam hal ini penjajah Belanda) dan timbulnya kesadaran untuk maju (modern) menjadikan dominasi peran dan pengaruh surau terhadap masyarakat Minangkabau tereduksi, sehingga (menurut Azra) surau mengalami krisis. Tetapi di balik krisis itu, surau telah menyumbangkan perannya bagi proses modernisasi masyarakat Minangkabau, khususnya dalam bidang pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat misalnya pada murid-murid yang diajarkan di surau pada awal abad ke-20 banyak yang “termodernkan” dan institusi surau itu sendiri banyak yang berubah fungsinya menjadi sekolah agama yang berwajah modern. *Wallâhu A’lam.*

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 1996, cet. ke-2.
- , *School and Politics, The Kaum Muda Movement in West Sumatera: 1927-1933*, New York: Cornell University, 1971.
- Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.
- Azra, Azyumardi, “The Rise And The Decline of The Minangkabau Surau”, Tesis Master of Arts The Departement of Middle East Languages and Culture, Columbia University, New York, 1988.
- , *Pespektif Islam Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1989.
- Barnadib, Sutari Imam, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta: FIP-IKIP, 1995, cet. ke-15.
- Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Dialog Jum’at, *Republika*, Jakarta, 8 Nopember 1996.
- Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam Dalam ekonomi Petani Yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah: 1784-1847*, alih bahasa: Lilian D. Tediadudhana, Jakarta: INIS, 1992.
- Dt. Palino Kayo, H.M.D., *Mengenang Sejarah Perguruan Thawalib Padang*.

- Panjang, Padang Paniang: Yayasan Thawalib Padang Panjang, 1970.
- Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimi, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: CV Rosda, 1981.
- Edwar, (ed.), *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*, Padang: Islamic Center Sumatera Barat, 1981.
- Gazalba, Sidi, *Mesjid, Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1983.
- Graves, Elizabeth E., *The Minangkabau Response to the Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*, New York: Cornell University, 1981.
- Gruneboum, Gustave E. Von (ed.), *Islam Kesatuan dan Keragaman*, alih bahasa Effendi N. Yahya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Lembaga Studia Islamika, 1983.
- Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Umminda, 1982.
- Horby, AS., *Oxford Student's Dictionary of Current English*, Hongkong: Oxford University Press, 1984.
- Ilyas, Yunahar, (et.al.), *Muhammadiyah dan NU, Reorientasi Wawasan Keislaman*, Yogyakarta: LPPI UMY, LKPSM NU dan PP al-Muhsin Yogyakarta, 1993.
- al-Jamali, Fadhil, *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, alih bahasa Muzayyin Arifin, Jakarta: Golden Trayon Press, 1988.
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: AI-Ma'arif, 1964.
- Naim, Mochtar, *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: UGM Press, 1979.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Navis, A.A., "Surau dan Kelangkaan Ulama", *Panji Masyarakat*, XXVI, 447, Oktober, 1984.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1924*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Prasodjo, Sudjoko, (et.al.), *Profil Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren, Direktorat BIMBAGA ISLAM, Departemen Agama Pusat, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat, Seri Monograf*, Jakarta: 1983.
- Rahardjo, M. Dawam, (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M, 1985.
- Richard, A. Johnson, *The Theory and Management of Systems*, Tokyo: Mc. Graw-Hill Kogakhusa, 1963.
- Ridwan, Kafrawi (ed.), "Surau", *EnsikloPedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993, Jilid 4.
- Saleh, Abdurrahman, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, Jakarta: Dharma Sakti, 1984.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- , *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Sudjana, S.F., *Pendidikan Nonformal*, Bandung: Yayasan PTDI Jawa Barat, 1974.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1995.

Zuhairini, (et.al.), *Sejarah pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, cet. ke-4.